



Pusat Data dan Informasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



LAPORAN KINERJA

PUSAT DATA DAN INFORMASI 2020

LAPORAN KINERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI
2020



Kami berupaya bagaimana masyarakat bisa memperoleh informasi sekaligus dapat memanfaatkan data yang kami sediakan.

Dr. Mahfudz

Kepala Pusat Data dan Informasi

PENGANTAR

Terdapat lima target kinerja kegiatan Pusat Data dan Informasi sesuai mandat yang tertuang di dalam perjanjian kinerja tahun 2020, yaitu 1). Data dan Informasi KLHK (IKLH, Statistik, SLHI, Status Hutan dan Kehutanan Indonesia); 2). Tingkat kepuasan layanan data dan Sistem Informasi KLHK; 3). Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/SPBE; 4). Jumlah pengunjung WEB KLHK. Secara umum Pusat Data dan Informasi telah berhasil melaksanakan dan menyelesaikan seluruh target kinerja yang ditetapkan dengan persentase capaian penyelesaian kinerja sebesar 100% serta capaian realisasi anggaran sejumlah 99,31%.

Laporan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan cakupan dari hasil-hasil pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2020 serta penetapan kinerja para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bidang di lingkup Pusat Data dan Informasi Tahun 2020.

Kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak khususnya yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan, serta dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi maupun proses perencanaan yang akan datang sehingga dapat tersusun dengan baik dan berhasil guna.

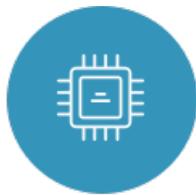
Jakarta, Januari 2021
Kepala Pusat



Dr. Mahfudz

NIP. 19670829 199203 1 004

DATA



TEKNOLOGI

INFORMASI



RINGKASAN EKSEKUTIF

Target kinerja kegiatan Pusat Data dan Informasi disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2020. Perjanjian kinerja dimaksud merupakan sebuah kontrak kesanggupan unit kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Terdapat empat indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 yaitu: Data dan Informasi KLHK (IKLH, Statistik, SLHI, Status Hutan dan Kehutanan Indonesia); Tingkat kepuasan layanan data dan Sistem Informasi KLHK; Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/SPBE; Jumlah pengunjung WEB KLHK.

Secara ringkas pencapaian dari indikator-indikator kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: **Satu**, penyusunan dokumen Data dan Informasi sebanyak 4 dokumen telah tercapai 100% dimana telah dapat disusun buku IKLH tahun 2019, buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia, buku SLHI 2019 dan buku Statistik KLHK. **Dua**, target nilai indeks tingkat kepuasan layanan data dan sistem informasi KLHK senilai 4 point tercapai 100%. **Tiga**, pencapaian target nilai SPBE KLHK sejumlah 3,5 point tercapai 100%; **Empat**, jumlah pengunjung WEB KLHK setiap tahun sejumlah 100.000 kunjungan tercapai 100%.

Selain kinerja di tahun 2020, serapan anggaran Pusat data dan Informasi mencapai 99,31% sehingga bila dibandingkan antara capaian output kegiatan dengan besaran serapan anggaran maka terdapat efisiensi sejumlah 0,99 dimana bila nilai efisiensi tersebut dibawah nilai 1 maka secara umum pelaksanaan kegiatan Pusat Data dan Informasi masuk kategori efisien.



CAPAIAN KINERJA
100%



REALISASI ANGGARAN
99.31%



EFISIENSI ANGGARAN
0,99



100%
DATA DAN INFORMASI KLHK (IKLH, STATISTIK, SLHI, STATUS HUTAN DAN KEHUTANAN INDONESIA)



100%
INDEKS TINGKAT KEPUASAN LAYANAN DATA DAN SISTEM INFORMASI KLHK



100%
NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KLHK



100%
PENGUNJUNG WEBSITE KEMENTERIAN LHK

RINGKASAN
CAPAIAN
KINERJA
PUSAT
DATA DAN
INFORMASI

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Data dan Informasi merupakan unit organisasi di bawah Menteri yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

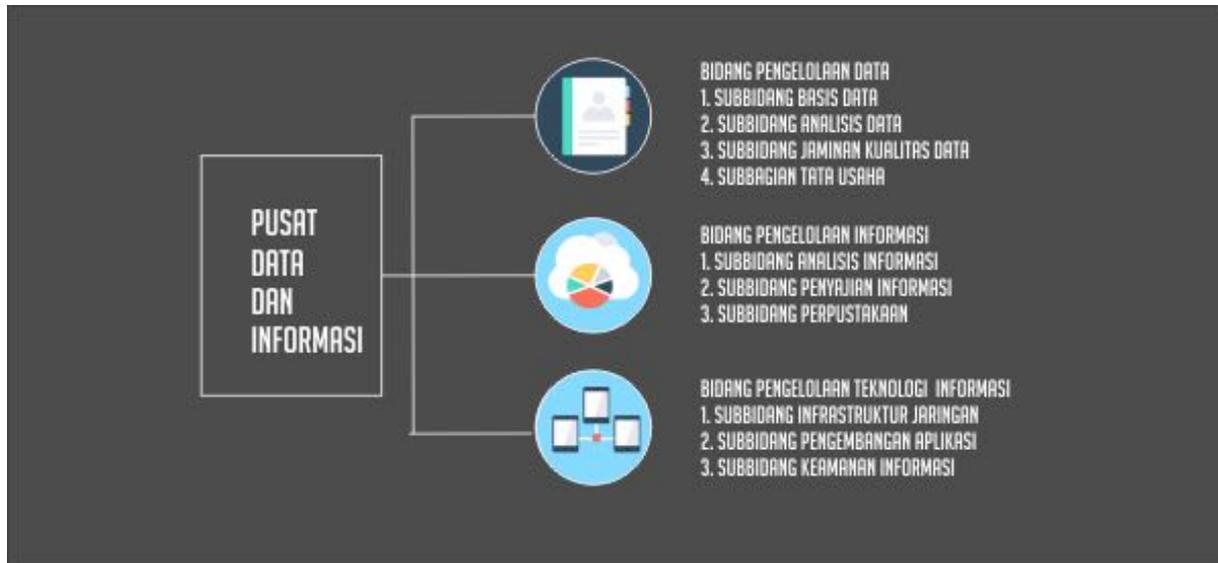
Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem dan teknologi informasi, serta sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
4. Pelaksanaan administrasi pusat.

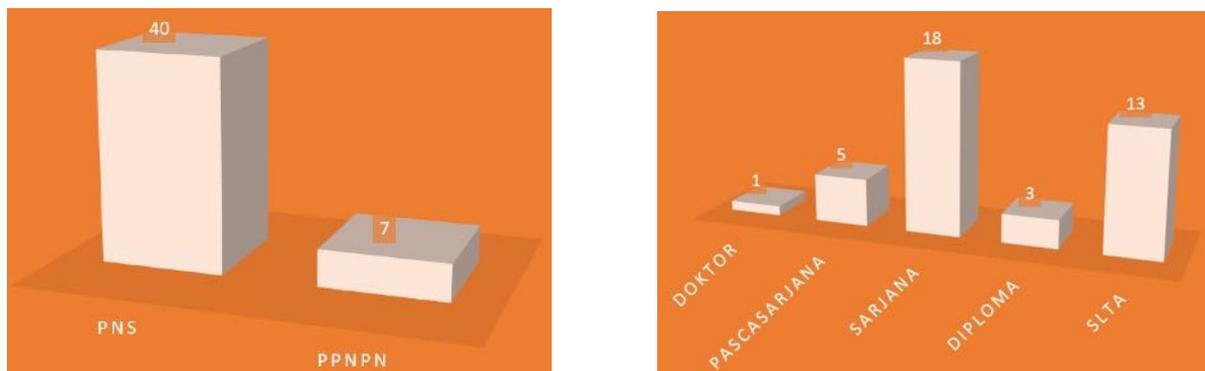
Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi diatas maka tantangan pusat data dan informasi adalah menyediakan layanan data data informasi yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan, layanan data dan informasi ke masyarakat, serta layanan teknologi informasi kepada unit-unit dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai bentuk akuntabilitas maka perlu disusun Laporan Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai petanggungjawaban kinerja yang telah ditandatangani.

Dalam menjalankan tugasnya, struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi membawahi tiga bidang yaitu: Bidang Pengelolaan Data, Bidang Pengelolaan Informasi dan Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi yang didukung oleh Sub bidang teknis dan Subbagian tata usaha.



Gambar 1. Organisasi Pusdatin

Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pusat data dan informasi di dukung oleh ASN sejumlah 50 orang terdiri dari 40 PNS dan 7 Pegawai dengan perjanjian kerja. Adapun tingkat Pendidikan PNS adalah sebagaimana grafik 1 dibawah ini.



Grafik 1. Komposisi ASN dan Tingkat Pendidikan Pusdatin 2020

II. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, Pusat Data dan Informasi berkewajiban untuk menyediakan layanan data informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan, layanan data dan informasi yang dapat diakses masyarakat, serta layanan teknologi informasi kepada unit-unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terdapat dua sasaran utama kegiatan Pusat Data dan Informasi yaitu: 1). Termanfaatkannya informasi kualitas lingkungan hidup untuk pengukuran kinerja KLHK dan pengambilan kebijakan; 2). Tercapainya layanan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi LHK. Selanjutnya dari dua sasaran tersebut dijabarkan dalam 4 Indikator kinerja Pusat Data dan Informasi beserta target capaian kinerja tahun 2020. Alokasi Anggaran untuk pencapaian target kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2020 adalah sejumlah Rp. 16.931.768.000,-

PERENCANAAN KINERJA PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI 2020



Gambar 2. Perencanaan Kinerja Pusdatin 2020

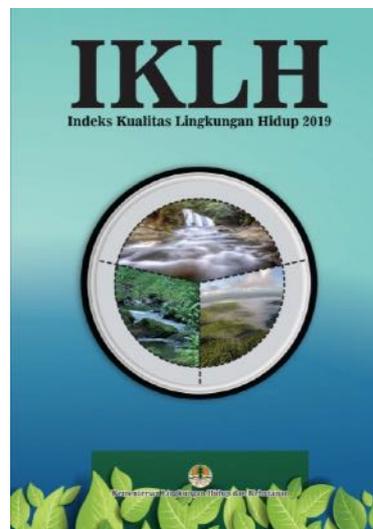
III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Data dan Informasi KLHK (IKLH, Statistik, SLHI dan Status Hutan dan Kehutanan Indonesia)

1. Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sebagai salah satu bagian dari target kinerja di tahun 2020 Pusat Data dan Informasi dimandatkan untuk memperbaharui dan mendeseminasikan IKLH nasional. IKLH merupakan publikasi resmi KLHK yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup di setiap provinsi dan Indonesia. Selama perkembangannya di tahun 2009–2019 perhitungan IKLH mengalami penyempurnaan sebanyak 4 kali. Di tahun 2019 perhitungan IKA dikembalikan lagi seperti tahun 2014 dengan menggunakan 7 parameter.

Melalui indeks yang diterbitkan sekali setahun ini maka kita dapat mengetahui seberapa jauh kondisi dan status kualitas lingkungan hidup suatu provinsi dari segi kualitas air, kualitas udara, tutupan lahan, serta kualitas lingkungan hidup Indonesia. Pada tahun 2019 nilai IKLH yaitu 66,55 dengan dipengaruhi oleh IKA, IKU, dan IKTL. Aspek kualitas air diukur di 101 sungai pada 34 provinsi, dengan nilai IKA sebesar 52,62. Adapun aspek kualitas udara diukur di kawasan perumahan, transportasi, industri, dan perkantoran di 427 kabupaten/kota dengan nilai IKU 86,56. Sementara aspek tutupan lahan dihitung berdasarkan data penutupan lahan dan data tutupan non hutan yang meliputi belukar, belukar rawa, ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati dengan nilai IKTL 62,00. Untuk lebih jelasnya maka disajikan tabel IKU, IKA, IKTL dan IKLH tahun 2019 (tabel 1).



Gambar 3. Buku IKLH 2019 dapat didownload di www.menlhk.go.id

Tabel 1. IKU, IKA dan IKTL dan IKLH 2019

| No. | Provinsi | IKU | IKA | IKTL | IKLH |
|-----|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Aceh | 91,08 | 60,56 | 76,57 | 76,12 |
| 2 | Sumatera Utara | 86,58 | 51,11 | 52,95 | 62,49 |
| 3 | Sumatera Selatan | 89,40 | 53,19 | 67,16 | 69,64 |
| 4 | Riau | 90,47 | 53,55 | 48,15 | 62,47 |
| 5 | Jambi | 87,17 | 58,49 | 60,90 | 68,06 |
| 6 | Sumatera Selatan | 87,13 | 64,45 | 39,84 | 61,41 |
| 7 | Bengkulu | 92,69 | 47,64 | 55,78 | 64,41 |
| 8 | Lampung | 86,63 | 55,74 | 36,65 | 57,37 |
| 9 | Bangka Belitung | 91,94 | 69,29 | 41,21 | 64,85 |
| 10 | Kepulauan Riau | 90,59 | 54,00 | 59,06 | 67,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 | DKI Jakarta | 67,97 | 41,94 | 24,66 | 42,84 |
| 12 | Jawa Barat | 74,93 | 45,59 | 38,70 | 51,64 |
| 13 | Jawa Tengah | 84,81 | 51,64 | 50,08 | 60,97 |
| 14 | DI Yogyakarta | 85,19 | 35,37 | 32,69 | 49,24 |
| 15 | Jawa Timur | 83,06 | 50,79 | 50,23 | 60,25 |
| 16 | Banten | 74,98 | 43,11 | 39,16 | 51,09 |
| 17 | Bali | 89,85 | 65,33 | 41,34 | 63,09 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 87,40 | 40,23 | 65,67 | 64,56 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 88,18 | 59,48 | 63,42 | 69,67 |
| 20 | Kalimantan Barat | 90,07 | 50,00 | 59,76 | 65,92 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 88,83 | 56,80 | 76,27 | 74,20 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 88,78 | 55,31 | 46,78 | 61,94 |
| 23 | Kalimantan Timur | 90,79 | 62,01 | 87,94 | 80,87 |
| 24 | Kalimantan Utara | 93,79 | 52,22 | 87,94 | 78,98 |
| 25 | Sulawesi Utara | 92,41 | 45,48 | 59,45 | 65,15 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 89,56 | 58,40 | 58,06 | 67,62 |
| 27 | Sulawesi Tengah | 92,98 | 62,59 | 83,89 | 80,23 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 90,01 | 50,55 | 74,67 | 72,03 |
| 29 | Gorontalo | 86,88 | 57,20 | 79,37 | 74,97 |
| 30 | Sulawesi Barat | 89,97 | 56,15 | 70,48 | 72,03 |
| 31 | Maluku | 88,72 | 57,56 | 89,17 | 79,55 |
| 32 | Maluku Utara | 92,64 | 53,61 | 86,61 | 78,44 |
| 33 | Papua Barat | 92,64 | 53,89 | 100,00 | 83,96 |
| 34 | Papua | 92,56 | 47,29 | 99,58 | 81,79 |
| Nilai Indeks Nasional | | 86,56 | 52,62 | 62,00 | 66,55 |

Predikat IKLH Nasional berada pada predikat Cukup Baik. Predikat IKLH untuk setiap provinsi disajikan pada tabel 2 dan gambar 4. Peningkatan nilai IKLH diprioritaskan pada provinsi dengan predikat di bawah IKLH dengan kontribusi provinsi terbesar.

Tabel 2. Predikat Nilai IKLH secara Nasional Tahun 2019

| No. | Predikat | Nilai IKLH | Jumlah Provinsi | Provinsi | |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Sangat Baik | IKLH > 80 | 4 | · Papua Barat | · Kalimantan Timur |
| | | | | · Papua | · Sulawesi Tengah |
| 2 | Baik | 70 < IKLH ≤ 80 | 8 | · Maluku | · Gorontalo |
| | | | | · Kalimantan Utara | · Kalimantan Tengah |
| | | | | · Maluku Utara | · Sulawesi Tenggara |
| | | | | · Aceh | · Sulawesi Barat |
| 3 | Cukup Baik | 60 < IKLH ≤ 70 | 17 | · Nusa Tenggara Timur | · Bengkulu |
| | | | | · Sumatera Barat | · Bali |
| | | | | · Jambi | · Riau |
| | | | | · Sulawesi Selatan | · Sumatera Utara |
| | | | | · Kepulauan Riau | · Kalimantan Selatan |
| | | | | · Kalimantan Barat | · Sumatera Selatan |
| | | | | · Sulawesi Utara | · Jawa Tengah |
| | | | | · Bangka Belitung | · Jawa Timur |
| · Nusa Tenggara Barat | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------|
| 4 | Kurang Baik | $50 < \text{IKLH} \leq 60$ | 3 | · Lampung · Jawa Barat | · Banten |
| 5 | Sangat Kurang Baik | $40 < \text{IKLH} \leq 50$ | 2 | · DI Yogyakarta | · DKI Jakarta |
| 6 | Waspada | $30 < \text{IKLH} \leq 40$ | – | | – |

3. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sebagai salah satu bagian dari target kinerja di tahun 2020 Pusat Data dan Informasi setiap tahunnya menyusun dokumen Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 berisikan kumpulan data-data statistik utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersumber dari dokumen statistik 13 Eselon I Kementerian LHK.

4. Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI)

Pada tahun 2019, Pusat Data dan Informasi ditargetkan dapat menyusun 1 buku Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2019. SLHI merupakan potret kondisi lingkungan hidup di Indonesia sebagai acuan dan wawasan bagi masyarakat, pemerintah, akademisi, sektor swasta, politisi dan masyarakat secara luas. Status Lingkungan Hidup Indonesia berisi tentang isu-isu lingkungan yang aktual dan berkembang di masyarakat serta respon dari masyarakat, pemerintah dan swasta. SLHI diharapkan juga dapat menjadi salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Tahapan penyusunan SLHI cukup panjang, antara lain dengan mengumpulkan data dan informasi dari daerah yang antara lain dituangkan dalam dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang disusun oleh setiap pemerintah daerah baik kabupaten, kota dan propinsi. Dokumen IKPLHD kemudian dijadikan bahan bagi penilaian bagi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah, dimana melalui serangkaian proses penilaian yang melibatkan para pakar, akademisi dan tokoh masyarakat, Kementerian LHK melalui Presiden memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang dinilai mampu mengelola lingkungan hidupnya secara baik.



Gambar 9. SLHI tahun 2020

Pada tahun 2019 telah terpilih Kepala Daerah dan pimpinan DPRD/Ketua Komisi yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan yang dinilai memiliki kepemimpinan baik terhadap pengelolaan hidup di daerah sehingga berhak mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra antara lain:

3. Tingkat Provinsi:
 - a. Provinsi Sumatera Barat
 - b. Provinsi Jawa Tengah
 - c. Provinsi Jawa Barat
4. Tingkat Kota:
 - a. Kategori Kota Besar
 - Kota Surabaya
 - Kota Balikpapan
 - Kota Padang
 - b. Kategori Kota Sedang
 - Kota Jambi
 - Kota Ambon
 - c. Kategori Kota Kecil
 - Kota Padang Panjang
 - Kota Payakumbuh
 - Kota Bukittinggi
5. Tingkat Kabupaten:
 - a. Kategori Kabupaten Besar
 - Kabupaten Lumajang
 - Kabupaten Boyolali
 - Kabupaten Bandung
 - b. Kategori Kabupaten Sedang
 - Kabupaten Magetan
 - Kabupaten Pesisir Selatan
 - Kabupaten Gowa
 - c. Kategori Kabupaten Kecil
 - Kabupaten Sukoharjo
 - Kabupaten Dharmasraya
 - Kabupaten Buleleng

Sedangkan penerima penghargaan green leadership Pimpinan DPRD/pimpinan pada tahun 2019 untuk tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

1. Tingkat provinsi:
 - a. Provinsi Sumatera Barat
 - b. Provinsi Jawa Tengah
 - c. Provinsi Jawa Barat
2. Tingkat Kota:
 - a. Kategori Kota Besar
 - Kota Balikpapan
 - Kota Padang
 - Kota Tangerang
 - d. Kategori Kota Sedang
 - Kota Ambon
 - Kota Jambi
 - e. Kategori Kota Kecil
 - Kota Padang Panjang
 - Kota Bukittinggi

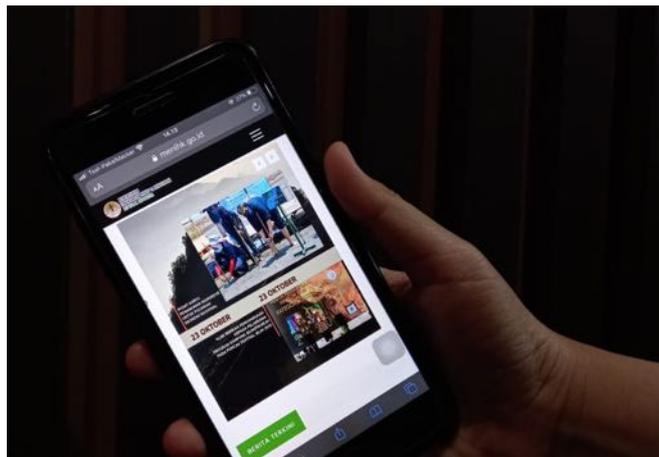
- Kota Payakumbuh
- 3. Tingkat Kabupaten:
 - a. Kategori Kabupaten Besar
 - Kabupaten Boyolali
 - Kabupaten Lumajang
 - Kabupaten Bandung
 - b. Kategori Kabupaten Sedang
 - Kabupaten Magetan
 - Kabupaten Gowa
 - Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Kategori Kabupaten Kecil
 - Kabupaten Sukoharjo
 - Kabupaten Dharmasraya
 - Kabupaten Buleleng

4. Status Hutan dan Kehutanan Indonesia tahun 2020

Buku ini berisi informasi gambaran keadaan hutan Indonesia 2020 yang dapat dianggap sebagai dokumen politik yang merefleksikan proses partisipatif dalam mencapai konsensus berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses pengelolaan hutan Indonesia.

B. Pengunjung Website Kementerian LHK

Sejak tahun 2015 Pusat Data dan Informasi telah membangun dan mengelola website resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di awal pembangunan Pusat Data dan Informasi melakukan sinkronisasi sub domain pada setiap unit Eselon 1 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Komite Informasi dan Penyiaran Publik (KIPP), di tahun 2020 Pusat Data dan Informasi telah melakukan pengembangan dan



Gambar 6. Dashboard baru Website Resmi KLHK (www.menlhk.go.id)

penyesuaian terhadap halaman website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Pusdatin secara rutin melakukan update data dan informasi pada halaman website KLHK, melakukan layanan hosting, layanan permohonan subdomain dan e-mail resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan data monitoring yang diperoleh, pada kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 jumlah kunjungan website KLHK selama tahun 2020 adalah sejumlah 2.029.314 pengunjung.

C. Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Sistem Informasi Kementerian LHK

Sebagai salah satu indikator kinerja kegiatan, nilai tingkat kepuasan layanan data dan sistem informasi satker Pusat Data dan Informasi diperoleh melalui proses survey secara online yang bersifat pilihan dan tidak memaksa pengguna. Survey ini diikuti oleh 50 orang responden yang merupakan PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Survey dibagi dalam 3(tiga) kategori yaitu:

1. Layanan Teknologi Informasi
2. Layanan Data
3. Layanan Informasi.

Setelah responden mengisi seluruh pertanyaan dan ditanyakan tentang respon terhadap ketiga kategori di atas dan dilakukan pengolahan data untuk skala linkert seperti di atas, diperoleh nilai indeks sebesar **4,12** atau setara dengan **82,42% (SANGAT BAIK)**. Nilai tersebut apabila dirinci dalam seluruh kategori yang ditanyakan dari unsur pelayanan kepada responden diperoleh sebagai berikut:

| No | Unsur Pelayanan | Nilai % | Keterangan |
|----|---|---------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Layanan Teknologi Informasi | | |
| | 1. Profesionalitas Sumber Daya Manusia | 86,67% | Sangat Baik |
| | 2. Layanan fasilitasi virtual meeting secara umum | 83,33% | Sangat Baik |
| | 3. Layanan akun mail.menlhk.go.id secara umum | 65,00% | Baik |
| | 4. Layanan domain menlhk.go.id secara umum | 85,00% | Sangat Baik |
| | 5. Layanan hosting pada data center Pusdatin secara umum | 81,67% | Sangat Baik |
| | 6. Layanan bandwidth secara keseluruhan | 73,33% | Baik |
| | 7. Fasilitasi penyediaan sertifikat keamanan sistem informasi (SSL) | 88,33% | Sangat Baik |
| B | Layanan Data | | |
| | 1. Profesionalitas Sumber Daya Manusia | 86,09% | Sangat Baik |
| | 2. Layanan Konsultasi IKPLHD secara umum | 86,67% | Sangat Baik |
| | 3. Layanan Data SLHI secara umum | 82,73% | Sangat Baik |
| C | Layanan Informasi | | Sangat Baik |
| | 1. Profesionalitas Sumber Daya Manusia | 81,67% | Sangat Baik |
| | 2. Layanan informasi website utama www.menlhk.go.id secara umum | 81,67% | Sangat Baik |
| | 3. Layanan terbitan Statistik KLHK secara umum | 83,33% | Sangat Baik |
| | 4. Layanan terbitan SOIFO secara umum | 81,67% | Sangat Baik |

D. Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/SPBE

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka setiap tahun dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui hasil Evaluasi SPBE yang telah dilakukan di tahun 2020 oleh MenPAN-RB diketahui bahwa nilai indeks pelaksanaan SPBE di Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebesar 3,61 atau sama dengan nilai SPBE di tahun 2019, hal tersebut disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 MenPAN-RB membatasi sample instansi baik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Memperhatikan nilai indeks SPBE yang diperoleh dapat dipastikan bahwa Pusat Data dan Informasi telah 100% berhasil menyelesaikan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan pada uraian capaian-capaian indikator kinerja diatas, maka nilai kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut:



Gambar 11. Capaian Kinerja Pusdatin 2020

Realisasi Anggaran

Total pagu anggaran (RM dan HLN) pada Pusat Data dan Informasi Tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 16.931.768.000,-. Terdiri dari sumber dari RM Rp. 10.320.100.000,- (60,95%) dan bersumber dari Hibah Luar Negeri (HLN) Rp. 6.611.668.000,- (39,05%). Berdasarkan pada data OMSPAN, realisasi pelaksanaan anggaran sebesar Rp.16.814.765.267,- atau sebesar 99,31%, dimana realisasi yang bersumber dari RM Rp. 10.254.748.169,- (60,99%) dan realisasi yang bersumber dari HLN Rp. 6.560.017.098 (39,01%).

Berdasarkan pada capaian kinerja Pusat data dan Informasi (100%) dan realisasi pelaksanaan anggaran (99,31%) maka terdapat rasio sebesar 0,99. Hal tersebut menunjukkan penggunaan anggaran Pusat Data dan Informasi sangat efisien terhadap capaian kinerja.



Gambar 12. Realisasi Anggaran tahun 2020

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran 4 indikator kinerja Pusat Data dan Informasi, masing-masing indikator kinerja dapat tercapai 100%, yaitu Data dan Informasi KLHK (IKLH, SLHI, Statistik, SLHI), Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Sistem Informasi KLHK, Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Jumlah Pengunjung Website KLHK.

Dari aspek pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran Pusat data dan informasi tahun 2020 adalah sebesar 99,31%. Apabila dibandingkan antara capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja Pusat data dan informasi maka terdapat rasio 0,99 yang berarti penggunaan anggaran pada Pusat data dan informasi sangat efisien terhadap capaian kerjanya.

Upaya-upaya yang perlu ditingkatkan kedepan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan data dan informasi adalah :

- Meningkatkan sosialisasi, asistensi dan fasilitasi kepada daerah untuk lebih aktif dalam memanfaatkan aplikasi SILHKD/Data Alam untuk penyusunan dokumen IKPLHD.
- Meningkatkan sosialisasi dan asistensi kepada satuan kerja lingkup KLHK mengenai layanan teknologi informasi baik infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi dan keamanan informasi.
- Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan dan peningkatan bandwidth internet KLHK.
- Meningkatkan layanan data, informasi, perpustakaan, dan museum lingkup KLHK.
- Meningkatkan layanan penyediaan akun mail.menlhk.go.id kepada para ASN lingkup Kementerian LHK



Kepala Pusat,

Lt. Mahfudz

NIP. 19670829 199203 1 004

LAMPIRAN







